ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dasar hukum dan kemungkinan dikabulkannya klaim ganti kerugian immateriil akibat wanprestasi dalam perjanjian keperdataan di Indonesia. Permasalahan tersebut timbul karena dalam praktik peradilan, klaim immateriil lebih lazim dikabulkan dalam kasus perbuatan melawan hukum dibandingkan dalam kasus wanprestasi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Penelitian ini menggunakan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa walaupun Pasal 1243 KUH Perdata tidak secara eksplisit menyebut kerugian immateriil, pengakuan terhadapnya tetap dimungkinkan melalui penafsiran sistematis dan evolutif atas hukum kontrak. Terdapat juga preseden yurisprudensi yang mengakomodasi ganti kerugian immateriil akibat wanprestasi, meskipun masih bersifat terbatas. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa kerugian immateriil akibat wanprestasi dapat dikabulkan sejauh dapat dibuktikan adanya kerugian yang nyata dan hubungan kausal yang kuat. Penulis menyarankan agar Mahkamah Agung memberikan pedoman yang lebih eksplisit bagi hakim di tingkat bawah, serta perlunya pembaruan hukum kontrak nasional agar lebih mengakomodasi kerugian immateriil dalam sengketa wanprestasi.

Kata Kunci: Wanprestasi, Ganti Rugi Immateriil, Perjanjian, Putusan Pengadilan.